

Di Padang Pajak Pendaftaran Perusahaan Masih Tersendat

Padang, Januari (Sgl)

PENERIMAAN Daerah dari sektor Pajak Pendaftaran Perusahaan di Kotamadya Padang, diperkirakan akan masih tersendat untuk sisa waktu 3 bulan mendatang. Dari target Rp.80.000.000 selama tahun anggaran 1988/1989, sampai bulan Desember lalu baru berhasil direalisasi Rp.36.069.084, atau sekitar 49,12 persen.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kotamadya Padang mengatakan hal itu menjabar Sgl di ruang kerjanya, kemarin.

Dikatakan, tersendatnya penerimaan daerah dari sektor pajak pendaftaran perusahaan ini karena terjadi benturan. Di satu pihak Pajak Pendaftaran Perusahaan itu dipungut oleh Pemerintah Daerah cq Di-

nas Pendapatan Daerah. Sedangkan di pihak lain, Departemen Perdagangan juga memungut retribusi Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan UU nomor 3 tahun 1982.

Pemilik perusahaan tampaknya bingung. Mereka menganggap, ketika Pajak Pendaftaran Perusahaan dibayarkan berarti juga telah membayar retribusi Wajib Daftar Perusahaannya.

Meskipun demikian, Anwar Idris tetap yakin bahwa penerimaan dari sektor ini akan tetap berhasil direalisasi sesuai target yang ditetapkan. Berbagai langkah telah diatur sedemikian rupa, sehingga pihak pengusaha tidak merasa dirugikan.

Anwar Idris mengemukakan, secara berangsur-angsur upaya meyakinkan masyarakat akan tetap dilakukan. Antara lain dengan men-

adakan koordinasi dengan pihak Departemen Perdagangan. Caranya, sebelum izin dagang dikeluarkan Departemen Perdagangan, pengusaha harus punya izin tempat usaha dengan memperlihatkan bukti lunas pembayaran pajak pendaftaran perusahaannya.

Sektor lain yang juga diperkirakan tersendat adalah penerimaan pajak radio. Di sektor ini, persoalannya menyangkut biaya operasi yang jauh lebih besar ketimbang pajak itu sendiri. Diungkapkan, setiap radio dikenakan pajak Rp.50/bulan, tapi biaya operasinya kadang-kadang bisa melebihi. Sebagai contoh dikemukakan, biaya materainya saja hampir mencapai Rp.50.

Oleh karena itulah dalam APBD 1988/1989 ini rencana penerimaan pajak radio ini sengaja tidak dianggarkan atau dengan kata lain Free Memory. Anwar Idris belum bisa memastikan apakah untuk tahun anggaran 1989/1990 mendatang juga akan difreememorikan. "Hal ini ditentukan oleh hasil putusan sidang dewan," katanya.

Pajak Rumah Bilyar, menurut Anwar Idris sampai bulan Desember lalu baru terealisasi sekitar 58,63 persen atau Rp.3.703.850 dari Rp.7.500.000 target penerimaan selama tahun anggaran 1988/1989.

Menurutnya hal ini disebabkan karena terjadi penutupan 9 rumah bilyar belum lama ini.

Secara keseluruhan, dari 8 jenis penerimaan (pajak pembangunan I, pajak radio, pajak bangsa asing, pajak tontonan, pajak reklame, pajak minuman keras, pajak rumah bola dan pajak pendaftaran perusahaan), telah berhasil direalisasi 86,51 persen. Artinya, dari Rp.1.225.800.000 telah berhasil dipungut Rp.956.516.875. Bila dilihat dari target penerimaan sampai bulan Desember yang hanya 83,33 persen, berarti target tersebut telah berhasil dilampaui. Demikian Anwar Idris, B.A (WT).-